



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**

Agenda Rapat	Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kebudayaan
Dasar	Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.
Tempat dan Tanggal	Hotel Padjadjaran Suite Bogor, Jawa Barat Jalan Bogor Nirwana No. 71 Mulyaharja Bogor Hari : Senin, 10 April 2023 Pukul: Pukul 11.00-13.00
Pimpinan Rapat	Manzila Falah, Perancang PUU Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM
Dihadiri	Kepala Biro HUPOK Kemenko PMK, Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko PMK, Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Setkab, ANRI.
Topik	Harmonisasi pasal demi pasal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kebudayaan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Apabila ditinjau dari kebutuhan memang diperlukan penyesuaian peraturan menteri koordinator yang ada dengan kebutuhan saat ini.

	- Jadwal Retensi Arsip (JRA) berkaitan dengan klasifikasi arsip sebagai dasar penyusunan jenis arsip, mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip sedangkan Permenko PMK yg ada adalah Permenko Kesra Nomor 63 Tahun 2010 Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kepala Biro HUPOK, Kemenko PMK: - Dalam rangka mewujudkan tertib arsip dan pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), diperlukan tata cara dan klasifikasi arsip untuk mempedomani masing- masing unit kerja. Hal ini meliputi pelaksanaan pengendalian, penataan, penemuan kembali, serta penyusutan arsip di lingkungan Kemenko PMK. - Secara konkrit, perlu adanya pengaturan yang melingkupi Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip, Pencipta Arsip, Unit Kerja, dan tugas Menteri Koordinator di Kemenko PMK yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Kemenko PMK dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait klasifikasi arsip. - Klasifikasi Arsip perlu disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Fungsi fasilitatif ini meliputi fungsi dari biro perencanaan hingga biro pengawasan di Kemenko PMK, sedangkan fungsi substantif ini meliputi fungsi dari kedeputian yang berada di Kemenko PMK. - Penyusunan Klasifikasi Arsip perlu juga dilaksanakan melalui tahapan-tahapan mulai dari analisis fungsi, analisis kegiatan, analisis transaksi, dan penyusunan skema klasifikasi. Skema klasifikasi arsip terkait perencanaan hingga evaluasi juga perlu diatur sehingga dapat disusun dalam bentuk berjenjang meliputi nama atau judul fungsi, nama kegiatan, dan nama transaksi kegiatan. - Berdasarkan hal tersebut, diperlukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) tentang Klasifikasi Arsip. - Penyusunan Rancangan Permenko PMK tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kemenko PMK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Klasifikasi arsip adalah hal yang harus dilakukan dalam rangka mengelompokkan jenis arsip agar tercipta arsip yang tersusun secara sistematis. Klasifikasi arsip akan dilakukan berdasarkan alfabet, numerik, alfanumerik, dan kronologis.
--	--

	Setkab: • Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tidak memerlukan izin presiden karena Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut hanya mengatur untuk internal. ANRI: • Perka ANRI menjadi dasar bagi seluruh kementerian/lembaga untuk mengatur mengenai JRA. • Retensi arsip dilakukan sejak arsip diciptakan dan diregistrasi sampai dengan berakhirnya masa proses penyelesaian terhadap suatu perkara. • bahwa draft yang saat ini dilakukan harmonisasi merupakan hasil konsultasi dari tim arsiparis Kemenko PMK kepada ANRI sehingga sudah sesuai dengan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.
Kesimpulan	Proses harmonisasi telah dilaksanakan dan ANRI telah sepakat muatan substansinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dirapikan oleh Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM dan akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasinya.

Dokumentasi :



RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib arsip dan pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu disusun klasifikasi arsip sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melaksanakan pengendalian, penataan, dan penemuan kembali, serta penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. Bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 63 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

- dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
7. Menteri Koordinator adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan

kebudayaan.

BAB II KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 3

- (1) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi fungsi:
 - a. perencanaan;
 - b. kerja sama antar lembaga;
 - c. hukum;
 - d. organisasi dan tata laksana;
 - e. persidangan;
 - f. kehumasan;
 - g. kepustakaan;
 - h. pendidikan dan pelatihan;
 - i. sistem teknologi informasi;
 - j. kepegawaian;
 - k. kearsipan;
 - l. keuangan;
 - m. ketatausahaan dan protokol;
 - n. rumah tangga; dan
 - o. pengawasan.
- (2) Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi fungsi:
 - a. peningkatan kesejahteraan sosial;
 - b. pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana;
 - c. peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan;
 - d. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - e. revolusi mental, pemajuan kebudayaan, dan prestasi olah raga;
 - f. peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama;
 - g. sekretariat kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
 - h. pengkajian dan penelaahan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. analisis fungsi;
 - b. analisis kegiatan;

- c. analisis transaksi; dan
 - d. penyusunan skema klasifikasi.
- (3) Analisis fungsi, analisis kegiatan, dan analisis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara konstruktif dan sistemik untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi, kegiatan, dan transaksi.
 - (4) Analisis fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara logis, faktual, relevan, aktual, sistematis, akomodatif, dan kronologis.
 - (5) Penyusunan skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memudahkan penjabaran uraian fungsi dan tugas secara logis, faktual, perbaikan berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis.

Pasal 5

- (1) Skema klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d harus menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk berjenjang yang meliputi:
 - a. nama atau judul fungsi;
 - b. nama kegiatan; dan
 - c. nama transaksi kegiatan.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan Kode Klasifikasi Arsip yang terdiri atas kombinasi huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran naskah dinas, pemberkasan, penataan Arsip, dan penyusutan Arsip.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Koordinator ini.

BABI III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 63 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

KLASIFIKASI ARSIP

A. Pendahuluan

Klasifikasi Arsip merupakan salah satu rangkaian kebijakan tata kearsipan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Klasifikasi Arsip sebagai sarana untuk penataan dan penemuan kembali arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam memberkaskan arsip yang diciptakan dan diterima. Arsip tersebut bersifat aktif dalam mendukung fungsi dan kegiatan operasional Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan analisis fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan menggunakan kode atau *symbol alphanumeric* dengan tujuan agar semua unit kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggunakan Klasifikasi Arsip yang sama, seragam, dan terpadu.

Setiap arsip yang diterima dan diciptakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus dibubuhi kode klasifikasi menurut masalahnya sebagaimana ditetapkan dalam Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tujuan penyusunan Klasifikasi Arsip adalah sebagai sistem pemberkasan arsip aktif di unit kerja. Pemberkasan/ filing system diperlukan untuk memudahkan penemuan kembali arsip yang diperlukan, karena permasalahan yang sama dan atau berhubungan akan memberkas menjadi satu.

B. Fungsi Fasilitatif

PR Perencanaan

01 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategis Pembangunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategis Pembangunan.

01.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

01.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

01.02 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

01.03 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

02 Program Kerja Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan program kerja tahunan.

02.00 Usulan Unit Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan usulan unit kerja beserta data pendukung.

02.01 Program Kerja Tahunan Unit Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Unit kerja Kementerian, termasuk rancangan awal penyusunan RKT dan Musrenbangnas.

02.02 Program Kerja Tahunan Lembaga / Instansi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian berupa rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

03 Penetapan Kinerja (PK/TAPJA)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Penetapan Kinerja Menteri, Pimpinan Unit Kerja, dan Staf / Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum.

04 Perencanaan Penyusunan Rencana Anggaran dan Penyusunan Renstra
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan anggaran dan Renstra.

04.00 Penyusunan Rencana Anggaran

Naskah-naskah Penyusunan Rencana Anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan).

04.01 Penyusunan Renstra

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Biaya Keluaran Rencana Strategis (RENSTRA).

05 Revisi Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan revisi anggaran baik terkait Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan, Anggaran Biaya Tambahan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

05.00 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan.

05.01 Anggaran Biaya Tambahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Biaya Tambahan.

05.02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

06 Laporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan

06.00 Laporan Berkala

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

06.01 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

06.02 Laporan Insidental

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Insidental.

07 Evaluasi Program

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program, baik evaluasi program unit kerja maupun evaluasi program kementerian.

07.00 Program Unit Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program Unit Kerja.

07.01 Program Kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi program Kementerian.

08 Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.

08.00 Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pedoman pembangunan agen perubahan, Internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi (rencana kerja tahunan), Bahan paparan reformasi birokrasi, Surat keterangan tim reformasi birokrasi, dan Laporan program reformasi birokrasi.

08.01 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KL Kerja Sama Lembaga

01 Rancangan Kebijakan terkait Pengelolaan Kegiatan Strategis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rancangan Kebijakan terkait Pengelolaan Kegiatan Strategis.

02 Kerjasama Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Memorandum of Understanding/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri, Rancangan/draft awal, Rancangan/draft akhir, Memori Perjanjian, dan Naskah asli yang ditandatangani.

03 Kerjasama Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama luar negeri

03.00 Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama Regional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Telaah/ Kajian/ Evaluasi dan Pertimbangan Hukum, Risalah pembuatan Memorandum of Understanding, Rancangan/draft awal, Rancangan/draft akhir, Memori Perjanjian, dan Naskah asli yang ditandatangani.

03.01 Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding*/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama Multilateral

Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Memorandum of Understanding*/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri, Rancangan/draft awal, Rancangan/draft akhir, Memori Perjanjian, dan Naskah asli yang ditandatangani.

03.02 Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding*/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama Bilateral

Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Memorandum of Understanding*/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri, Rancangan/draft awal, Rancangan/draft akhir, Memori Perjanjian, dan Naskah asli yang ditandatangani.

HK Hukum

01 Program Legislasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan produk hukum yang Program Legislasi.

02 Produk Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan produk-produk hukum

02.00 Produk Hukum yang bersifat pengaturan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang bersifat pengaturan (*regeling*), Emengikat umum dan ke dalam Kementerian, dimana norma perundangan-undangannya selalu bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus.

02.01 Produk Hukum yang bersifat penetapan (*beschiking*)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan produk hukum yang bersifat nyata, individual, selesai sekali (*final, einmalig*), seperti

- Keputusan Menteri, Keputusan Sekretaris Menteri, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- 03 Dokumen Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen hukum beserta peraturan Perundang-undangan yang dijadikan referensi.
- 04 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum.
04.00 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
04.01 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
- 05 Kasus/Sengketa Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus/sengketa hukum terkait litigasi dan non litigasi.
05.00 Litigasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas tentang kasus/sengketa berupa proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, berkas pembelaan dan bantuan hukum, dan telaah hukum dan opini hukum pada kasus Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara.
05.01 Non Litigasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas tentang kasus/sengketa berupa proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, berkas pembelaan dan bantuan hukum, dan telaah hukum dan opini hukum pada kasus Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, dan Arbitrase.
- OT Organisasi dan Ketatalaksanaan
- 01 Organisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan struktur/tugas/fungsi dan evaluasi organisasi.
01.00 Struktur / Tugas / Fungsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan struktur organisasi dan reorganisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mulai dari pembentukan, pengubahan hingga pembubaran organisasi.
01.01 Evaluasi Organisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas struktur organisasi dan reorganisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 02 Ketatalaksanaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan/ Penyelarasan Standar Operasional Prosedur dan tata hubungan kerja.
02.00 Penetapan/Penyelarasan Standar Operasional Prosedur
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan Standar Operasional Prosedur Unit, Pembahasan Standar Operasional Prosedur, Pengesahan Standar Operasional Prosedur, dan Evaluasi atas implementasi Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
02.01 Tata Hubungan Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tata hubungan kerja antar struktural, Tata hubungan kerja antar fungsional, dan Tata hubungan kerja antar struktural dan fungsional.
- PS Persidangan
- 01 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat koordinasi tingkat Menteri antara lain sidang kabinet, rapat terbatas, rapat paripurna tingkat Menteri, rapat koordinasi tingkat Menteri dan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

01.00 Sidang Kabinet (Sidkab)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sidang Kabinet bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mulai dari penyiapan, pelaksanaan sampai dengan hasil pelaporan persidangan.

01.01 Rapat Terbatas (Ratas)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rapat Terbatas (Ratas) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mulai dari penyiapan, pelaksanaan sampai dengan hasil pelaporan persidangan.

01.02 Rapat Paripurna Tingkat Menteri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rapat Paripurna Tingkat Menteri bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mulai dari penyiapan, pelaksanaan sampai dengan hasil pelaporan persidangan.

01.03 Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat koordinasi tingkat menteri bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mulai dari bahan sampai dengan hasil rapat persidangan.

01.04 Rapat Menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rapat Menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mulai dari bahan sampai dengan hasil rapat persidangan.

02 Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya mulai dari bahan sampai dengan hasil rapat persidangan.

03 Rapat Internal Staf

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat internal staf.

03.00 Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

03.01 Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

04 Pengelolaan Data

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data tingkat pusat dan daerah.

04.00 Pengelolaan Data di Tingkat Pusat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan data hasil persidangan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di pusat.

04.01 Pengelolaan Data di Tingkat Daerah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan data hasil persidangan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di daerah.

HM Hubungan Masyarakat

01 Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga dan masyarakat.

- 01.00 Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rapat Dengar Pendapat/Hearing Dewan Perwakilan Rakyat, dan Rapat pimpinan dengan Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah/ Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 01.01 Lembaga Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rapat antar Lembaga Negara.
- 01.02 Organisasi Nasional dan Internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Organisasi Nasional dan Internasional.
- 01.03 Perusahaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Organisasi Nasional dan Internasional.
- 01.04 Perguruan Tinggi / Sekolah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi / Sekolah.
- 01.05 Media Massa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Media Massa.
- 01.06 Forum Kehumasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Forum Kehumasan.
- 02 Pemenuhan Informasi Publik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemenuhan Informasi Publik.
- 03 Penerbitan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerbitan Penerbitan Bulletin/majalah/jurnal/ naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.
- 04 Publikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Publikasi baik media cetak maupun media elektronik.
- 05 Dokumentasi / Liputan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas/ foto/ video/ rekaman suara/ multimedia baik dari Menteri, Pejabat Tingkat Eselon I, maupun Pejabat lain/ Pegawai.
- 06 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan berupa kliping koran, brosur/ leaflet/ poster/ plakat, dan pengumuman/ pemberitaan.
- 07 Penghargaan Kelembagaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penghargaan Kelembagaan.
- 08 Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pameran/ sayembara/ lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan.
- KE Kepustakaan
- 01 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka
 - 01.00 Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit
Naskah-naskah terkait bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit.
 - 01.01 Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka
Naskah-naskah terkait administrasi pengolahan deposit bahan pustaka.
- 02 Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka
 - 02.00 Pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka, seperti buku induk koleksi, daftar

buku terseleksi, daftar buku dalam pemesanan, daftar buku dalam permintaan, daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hibah, deposit, daftar pengiriman bahan pustaka surplus, lembar kerja pengolahan buram dan perkatalogan, jajaran kartu utama, daftar tambahan buku, dan kartu kendali.

01.01 Layanan jasa perpustakaan dan informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan jasa perpustakaan dan informasi berupa data statistik anggota, pengunjung dan peminjam bahan pustaka dan terkait pertanyaan rujukan dan jawaban.

TI Teknologi Informasi dan Komunikasi

01 Rencana Strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi Sistem Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana strategis/master plan pembangunan sistem informasi sistem informasi.

02 Dokumentasi Arsitektur

Naskah-naskah yang berkaitan dengan topologi jaringan, arsip spesifikasi perangkat server dan naskah service level agreement (SLA) bagian sistem dan teknologi informasi terkait sistem informasi, sistem aplikasi dan infrastruktur.

03 Dokumen Implementasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan teknologi informasi di lingkungan Kemenko PMK terkait Sistem Informasi, Sistem Aplikasi dan Infrastruktur.

04 Perekaman dan Pemutakhiran Data

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perekaman dan pemutakhiran data termasuk formulir isian, daftar petugas perekaman, jadwal pelaksanaan kegiatan perekaman, dan laporan hasil perekaman dan pemutakhiran.

05 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data

Naskah-naskah yang berkaitan dengan migrasi sistem aplikasi dan data, termasuk perencanaan migrasi, pelaksanaan migrasi, berita acara kegiatan migrasi, daftar sistem aplikasi dan data yang di migrasi dan laporan hasil migrasi.

06 Dokumen Hosting

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen hosting, seperti formulir permintaan hosting, laporan hasil uji kelayakan dan laporan pelaksanaan hosting.

07 Keamanan Data

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan data, seperti backup data, antivirus dan firewall.

KP Kepegawaian

01 Formasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengadaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi sampai dengan persetujuan formasi.

01.00 Bahan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

01.01 Usulan dan Pertimbangan Formasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan pertimbangan penetapan formasi Aparatur Sipil Negara termasuk dokumen terkait Analisa Jabatan dan Beban Kerja.

01.02 Usulan Formasi Kepada Menteri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

- 01.03 Persetujuan Formasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Persetujuan Formasi dan Jabatan.
- 01.04 Penetapan Formasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses dan kegiatan penetapan formasi.
- 02 Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, seleksi sampai dengan pengumuman penerimaan termasuk nota usul pengangkatan Aparatur Sipil Negara dan seleksi Terbuka Jabatan.
- 03 Penetapan Nomor Induk Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota Usul Penetapan hingga Penetapan Nomor Induk Pegawai.
- 04 Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja mulai dari pengumuman, lamaran, seleksi sampai dengan pengumuman penerimaan termasuk nota usul pengangkatan.
- 05 Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural, fungsional dan pendelegasian wewenang.
 - 05.00 Struktural
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan struktural termasuk di dalamnya staf khusus dan tenaga ahli.
 - 05.01 Fungsional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional.
 - 05.02 Pendelegasian Wewenang
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang, termasuk didalamnya Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- 06 Mutasi Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, penetapan perubahan data pegawai, peninjauan masa kerja dan berkas badan pertimbangan jabatan dan pangkat.
 - 06.00 Mutasi Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan mutasi pegawai termasuk usulan alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar perwakilan, mutasi ke dan dari perwakilan, pemindahan sementara, persetujuan / pertimbangan kepala badan kepegawaian negara.
 - 06.01 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan Kenaikan Pangkat/ Golongan/ Jabatan.
 - 06.02 Penetapan Perubahan Data Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan data dasar/ status/ kedudukan hukum pegawai.
 - 06.03 Peninjauan Masa Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peninjauan Masa Kerja Pegawai.
 - 06.04 Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat.
- 07 Pengembangan Karir

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan karir termasuk pelatihan dasar, pendidikan dan pelatihan pimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis, dan pendidikan dan pelatihan lembaga ketahanan nasional

07.00 Pelatihan Dasar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan dasar.

07.01 Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan diklat pimpinan.

07.02 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan diklat teknis.

07.03 Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Ketahanan Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan lembaga ketahanan nasional.

08 Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran Aparatur Sipil Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tugas belajar/ ijin belajar/ kursus/ magang/ ujian dinas/ praktek kerja di instansi lain/ pertukaran Aparatur Sipil Negara.

08.00 Perencanaan dan Penyusunan Analisis Kebutuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen terkait perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan atas tugas belajar/ ijin belajar/ kursus/ magang/ ujian dinas/ praktek kerja di instansi lain/ pertukaran Aparatur Sipil Negara.

08.01 Laporan atas Kegiatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan dokumen terkait perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan atas tugas belajar/ ijin belajar/ kursus/ magang/ ujian dinas/ praktek kerja di instansi lain/ pertukaran Aparatur Sipil Negara.

08.02 Ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/ Sertifikat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ijazah/ surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan/ sertifikat.

09 Penyesuaian Ijazah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian ijazah.

10 Penyusunan Sistem Karir

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan sistem karir.

11 Angka Kredit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajuan daftar usul dan penentuan angka kredit.

12 Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja, standar kinerja dan penilaian kinerja pegawai dan pengelolaan datanase dan analisis sistem informasi kinerja pegawai aparatur sipil negara.

12.00 Penilaian Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara, standar kinerja jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara, dan penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

12.01 Standar Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul dan penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan penilai prestasi kerja pegawai.

12.02 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan database penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara, analisis sistem informasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dan Teknis penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara.

13 Kode Etik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik

13.00 Kode Etik Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kode etik pegawai.

13.01 Disiplin

- Naskah-naskah yang berkaitan dengan penegakan disiplin dan peningkatan disiplin.
- 13.02 Pemberhentian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai, termasuk pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian sementara.
- 13.03 Pensiun
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pensiun pegawai, termasuk Administrasi pensiun Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, Penetapan Pensiun Aparatur Sipil Negara, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Aparatur Sipil Negara, dan Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya.
- 14 Status dan Kedudukan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan status dan kedudukan pegawai termasuk pertimbangan status kepegawaian, pertimbangan kedudukan pegawai, penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai dan perselisihan/sengketa kepegawaian.
- 14.00 Pertimbangan Status Kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian.
- 14.01 Pertimbangan Kedudukan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertimbangan kedudukan pegawai termasuk analisis kedudukan pegawai serta penyusunan pertimbangan kedudukan.
- 14.02 Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan keberatan pegawai.
- 14.03 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perselisihan/ sengketa kepegawaian mulai dari proses pengajuan sampai dengan penetapan termasuk pengajuan keberatan pegawai serta bantuan/advokasi hukum bagi pegawai.
- 15 Sistem Informasi Kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan data dan sistem informasi kepegawaian.
- 15.00 Pengolahan Data
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan database kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Penyelesaian permasalahan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara.
- 15.01 Informasi Kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non Aparatur Sipil Negara dan Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik.
- 15.02 Pengembangan sistem informasi kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengembangan sistem informasi kepegawaian.
- 15.03 Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem pengelolaan arsip kepegawaian termasuk arsip kepegawaian elektronik dan arsip kepegawaian fisik.
- 16 Adminstrasi Kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Adminstrasi Kepegawaian.
- 16.00 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
- 16.01 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting
Naskah-naskah yang berkaitan dengan cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti alasan penting.

- 16.02 Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara.
- 16.03 Dokumentasi Identitas Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi identitas pegawai, termasuk usul penetapan kartu pegawai/kartu pegawai elektronik/kartu istri/kartu suami, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, dan keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai.
- 16.04 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas kepegawaian dan daftar urut kepangkatan.
- 16.05 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan.
- 17 Kesejahteraan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai.
 - 17.00 Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai.
 - 17.01 Layanan Asuransi Pegawai/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan asuransi pegawai/badan penyelenggara jaminan sosial.
 - 17.02 Layanan Tabungan Perumahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan tabungan perumahan.
 - 17.03 Layanan Bantuan Sosial
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan bantuan sosial.
 - 17.04 Layanan Pakaian Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pakaian dinas.
 - 17.05 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pegawai yang meninggal karena dinas.
 - 17.06 Pemberian Tali Kasih
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tali kasih.
 - 17.07 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa.
 - 17.08 Organisasi Non Kedinasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Organisasi Non Kedinasan
- 18 Administrasi Perseorangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Administrasi Perseorangan.
 - 18.00 Berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil, termasuk lamaran Calon Aparatur Sipil Negara, nota penetapan nomor induk pegawai dan kelengkapannya, nota persetujuan/ pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara, keputusan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, keputusan peninjauan masa kerja, keputusan kenaikan pangkat, pernyataan melaksanakan tugas, pernyataan pelantikan, pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional, keputusan perpindahan wilayah kerja, keputusan perpindahan antar instansi, keputusan cuti di luar tanggungan negara, berita acara pemeriksaan, keputusan hukuman jabatan atau hukuman disiplin, keputusan perbantuan atau dipekerjakan ke luar instansi induk, keputusan penarikan kembali dari perbantuan atau dipekerjakan, keputusan pembebasan dari jabatan organik karena diangkat

sebagai pejabat negara, keputusan pengalihan Aparatur Sipil Negara, keputusan pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara, keputusan pemberhentian sementara sebagai Calon Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara, Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, keterangan pernyataan hilang, keterangan kembalinya Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan hilang, keputusan penggantian nama, perbaikan tanggal tahun lahir, akta nikah atau cerai, akta kelahiran, PUPNS/PUASN, pengambilan sumpah atau janji Aparatur Sipil Negara dan Jabatan, permohonan netralitas Aparatur Sipil Negara, keterangan mutasi keluarga, keterangan meninggal dunia, keterangan peningkatan pendidikan, penetapan angka kredit jabatan fungsional, keterangan hasil penelitian khusus, pemberitahuan kenaikan gaji berkala, tugas atau izin belajar, izin bepergian ke luar negeri, ijazah atau sertifikat, keputusan pengangkatan pada jabatan di luar instansi induk, keputusan penempatan atau penarikan pegawai, pertimbangan status Aparatur Sipil Negara, keputusan pengaktifan kembali sebagai Aparatur Sipil Negara, pernyataan pengunduran diri dari jabatan organik karena dicalonkan sebagai Kepala atau Wakil Kepala Daerah, dan keputusan pensiun.

- 18.01 Berkas perseorangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- 18.02 Berkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara yang Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan aparatur sipil negara yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional.
- 19 Berkas Perseorangan Menteri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan menteri.
- 20 Penilaian Kompetensi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kompetensi.
 - 20.00 Penilaian Kompetensi Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kompetensi pegawai.
 - 20.01 Penilaian Kompetensi Pejabat Eselon I dan II
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kompetensi pejabat Eselon I dan II.
 - 20.02 Hasil Penilaian Kompetensi Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil penilaian kompetensi.
 - 20.03 Hasil Penilaian Kompetensi Pejabat Eselon I dan II
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil penilaian kompetensi pejabat Eselon I dan II.
- 21 Analisis Jabatan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan, antara lain analisis jabatan struktural, analisis jabatan fungsional tertentu, dan analisis jabatan fungsional umum.
- 22 Analisis Beban Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis beban kerja.
- 23 Standar Kompetensi Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan.
 - 23.00 Standar Kompetensi Jabatan Struktural
Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan struktural.
 - 23.01 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan fungsional.

KA Kearsipan

01 Administrasi Persuratan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi persuratan.

01.00 Agenda Surat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan dan penyusunan agenda surat.

01.01 Lembar Pengantar / Buku Ekspedisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lembar Pengantar / Buku Ekspedisi.

01.02 Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan dokumen/arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan dan layanan lembar pengantar / buku ekspedisi.

01.03 Formulir/Catatan Permintaan Penomoran Surat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan dan layanan formulir/catatan permintaan penomoran surat.

02 Pemeliharaan Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan arsip.

02.00 Pengelolaan Arsip Aktif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip aktif termasuk kegiatan pemberkasan aktif dan pembuatan daftar arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas).

02.01 Pengelolaan Arsip Inaktif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan arsip inaktif termasuk pembuatan daftar arsip inaktif, dan sarana dan prasarana dalam penanganan arsip inaktif.

02.02 Penyimpanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyimpanan arsip seperti kegiatan terkait skema penataan arsip, peta lokasi penyimpanan arsip, dokumen checklist pengaturan suhu dan temperature ruang penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan.

02.03 Alih Media Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih media arsip termasuk daftar arsip yang di alih mediakan dan berita acara alih media arsip.

02.04 Akses Pengguna Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan akses pengguna arsip termasuk buku peminjaman arsip dan formulir peminjaman.

02.05 Arsip Informasi Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan arsip informasi publik termasuk daftar arsip.

03 Arsip Vital

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan dan pengelolaan arsip vital termasuk daftar arsip vital.

04 Arsip Terjaga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan dan pengelolaan arsip terjaga termasuk berita acara penyerahan salinan autentik arsip dan daftar arsip terjaga.

05 Sistem Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan sistem kearsipan.

06 Penyusutan Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penanganan dan pengelolaan penyusutan arsip.

06.00 Pemindahan Arsip Inaktif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemindahan arsip termasuk berita acara pemindahan arsip dan daftar arsip yang dipindahkan.

06.01 Pemusnahan Arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemusnahan arsip termasuk surat keputusan tim pemusnahan, surat permohonan persetujuan pemusnahan, surat pertimbangan dari panitia penilai arsip, persetujuan pemusnahan, surat keputusan pemusnahan, berita acara pemusnahan dan daftar arsip musnah.

06.02 Penyerahan Arsip Statis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyerahan arsip statis termasuk surat usulan penyerahan arsip statis, surat pertimbangan dari panitia penilai arsip, persetujuan penyerahan arsip, surat keputusan penyerahan, berita acara penyerahan arsip statis dan daftar arsip usul serah.

07 Pembinaan Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan.

07.00 Bimbingan Teknis Kearsipan/ Bimbingan Konsultasi Kearsipan/ Sosialisasi Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis kearsipan/ bimbingan konsultasi kearsipan/ sosialisasi kearsipan termasuk surat undangan kegiatan, surat perintah tugas, bahan paparan, nota dinas, daftar hadir dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

07.01 Supervisi/ Pengawasan Kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi / pengawasan kearsipan termasuk surat undangan kegiatan, surat perintah tugas, bahan paparan, dan pelaporan hasil supervisi/pengawasan kearsipan.

07.02 Monitoring

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring kearsipan termasuk surat undangan kegiatan, surat perintah tugas, salinan dokumen kegiatan, dan pelaporan hasil monitoring.

KU Keuangan

01 Pelaksanaan Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.

01.00 Rencana Anggaran Biaya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan rencana anggaran biaya (RAB).

01.01 Penggajian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.

01.02 Pengeluaran Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, mulai dari surat permintaan pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), SPP-LS (Langsung), SPPUP (Uang Persediaan), SSP-TUP (Tambahan Uang Persediaan), ABT (Anggaran Belanja Tambahan), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), daftar uang makan/uang lembur/ honorarium/ tunjangan kinerja, surat kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), juklak/ mekanisme pengelolaan APBN serta bahan nota keuangan.

01.03 Belanja Barang Habis Pakai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja barang habis pakai.

01.04 Belanja Barang Inventaris / Barang Modal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja barang inventaris / barang modal.

01.05 Belanja Jasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja jasa.

02 Pengelolaan Perbendaharaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan.

02.00 Perbendaharaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa surat keputusan penunjukan dan pengangkatan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan SPM dan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

02.01 KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan termasuk surat keputusan pengangkatan kuasa pengguna anggaran, surat keputusan pengangkatan pejabat pembuat komitmen, surat keputusan pengangkatan pejabat penandatanganan surat perintah membayar, dan surat keputusan pengangkatan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran.

02.02 Buku/Kartu Pengawasan Kredit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa buku/kartu pengawasan kredit anggaran

02.03 Pajak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan, Surat Setoran Pajak (SSP), dan nota konfirmasi.

02.04 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.

02.05 Pengembalian Belanja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, barang, modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

02.06 Berita Acara Pemeriksaan Kas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.

02.07 Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kartu pengawasan pembayaran penghasilan pegawai.

02.08 Pembukuan Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi anggaran.

03 Verifikasi Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran

04 Akutansi dan Pelaporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Akutansi dan Pelaporan.

04.00 Laporan Kas

Naskah-naskah terkait laporan kas termasuk Laporan kas, kas/register penutupan kas, laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

04.01 Laporan Keuangan Tahunan Unit Kerja

Naskah-naskah terkait laporan keuangan tahunan unit kerja.

04.02 Laporan Keuangan Tahunan Kementerian

Naskah-naskah terkait laporan keuangan tahunan kementerian.

05 Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara.

05.00 Laporan Hasil Pemeriksaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

05.01 Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara seperti: Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

06 Ketatausahaan Keuangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan.

06.00 Keterangan Penghasilan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.

06.01 SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran).

06.02 Pinjaman

Naskah-naskah terkait seluruh dokumen yang berkaitan dengan pinjaman dan bantuan donasi terhadap pihak eksternal di luar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

06.03 Iuran Keanggotaan Organisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan organisasi.

07 Bantuan / Pinjaman Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan / pinjaman luar negeri termasuk permohonan pinjaman luar negeri (blue book), dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (grey book), dokumen memorandum of understanding, dokumen memorandum of understanding, dan dokumen sejenisnya, dan alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri.

TP Ketatausahaan dan Protokol

01 Administrasi Menteri / Pimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi tata usaha menteri / pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

01.00 Agenda Pimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan agenda menteri termasuk undangan kegiatan, susunan kegiatan / rundown acara, surat perintah tugas dan laporan terkait kegiatan/perjalanan pimpinan.

01.01 Agenda Menteri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan agenda menteri termasuk undangan kegiatan, susunan kegiatan / rundown acara, surat perintah tugas dan laporan terkait kegiatan/perjalanan menteri.

01.02 Sambutan/Pidato Pejabat Eselon I

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sambutan/pidato pejabat eselon I.

01.03 Sambutan/Pidato Menteri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sambutan/pidato menteri.

01.04 Ucapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ucapan yang disampaikan oleh pimpinan / menteri termasuk ucapan selamat,

ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa dan ucapan permohonan maaf.

02 Keprotokolan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan administrasi tata usaha keprotokolan.

00.00 Upacara / Acara Kedinasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan upacara / acara kedinasan termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, dan upacara serah terima jabatan.

00.01 Buku Tamu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan buku tamu kegiatan / acara.

00.02 Buku Tamu Pejabat Eselon I dan Tokoh berskala Nasional dan Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku tamu pejabat eselon i dan tokoh berskala nasional dan internasional.

00.03 Kunjungan Dinas Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan dinas dalam negeri termasuk kunjungan presiden, wakil presiden, pejabat negara, anggota legislatif ke kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, kunjungan dinas menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan kunjungan dinas pejabat lain/pegawai.

00.04 Kunjungan Dinas Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan dinas tamu dari negara luar ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

00.05 Daftar Nama/ Alamat Kantor/ Pejabat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar nama/ alamat kantor /pejabat.

RT Kerumahtanggaan

01 Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana, usulan dan analisa dari unit kerja tentang perencanaan kebutuhan pengadaan dan pengadaan barang/jasa sejak proses permintaan penawaran sampai berita acara serah terima.

01.00 Analisis dan Pengadaan Perlengkapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan sejak proses permintaan penawaran sampai berita acara serah terima.

01.01 Tata Ruang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis, rekomendasi dan pelaksanaan pekerjaan terkait tata ruang.

01.02 Daftar Perkenalan Mampu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan terkait dengan daftar perkenalan mampu

02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan termasuk barang habis pakai/alat tulis kantor, perlengkapan kantor, tanah dan bangunan, kendaraan, telaahan pelaksanaan lelang/ pemilikan/ penunjukan langsung, dokumen lelang, instalasi/jaringan, peralatan kearsipan, jasa profesi, sewa rumah operasional/sewa gedung, jasa akomodasi, dan jasa lainnya.

03 Pengelolaan Barang Milik Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara.

03.00 Penyimpanan Barang Milik Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyimpanan barang milik negara termasuk penerimaan, surat bukti barang masuk,

- penyimpanan barang, pengeluaran barang dari gudang dan surat bukti pengeluaran barang.
- 03.01 Distribusi Penyaluran Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan distribusi penyaluran barang milik negara termasuk distribusi barang intern dan distribusi barang ekstern.
- 03.02 Inventarisasi Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan inventarisasi barang milik negara termasuk keputusan pembentukan tim, rencana kerja pelaksanaan inventarisasi, kertas kerja inventarisasi, berita acara inventarisasi, daftar inventaris /buku barang/daftar barang lainnya, dan laporan hasil inventarisasi.
- 03.03 Penghapusan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan penghapusan barang milik negara termasuk keputusan pembentukan tim, berita acara penghapusan barang milik negara, daftar barang yang dihapus, dan laporan hasil pelaksanaan penghapusan barang milik negara termasuk di dalamnya proses lelang penghapusan.
- 03.04 Hibah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hibah.
- 03.05 Pelaporan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan barang milik negara termasuk laporan kondisi barang, laporan barang kuasa pengguna, berita acara rekonsiliasi eksternal dan internal , laporan persediaan habis pakai, laporan persediaan tidak habis pakai dan laporan pengelolaan barang milik negara.
- 03.06 Sertifikasi Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sertifikasi barang milik negara.
- 04 Dokumen kepemilikan aset/ kekayaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan aset/ kekayaan termasuk sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, surat keterangan nomor kendaraan, blueprint dan lain-lain.
- 05 Pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Negara.
- 05.00 Pemeliharaan Gedung dan Taman
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan gedung dan taman termasuk kegiatan pertamanan/landscaping, penghijauan, perbaikan gedung, perbaikan rumah dinas/wisma dan kebersihan gedung dan taman.
- 05.01 Pengurusan Kendaraan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kendaraan dinas termasuk pengurusan surat-surat kendaraan dinas, pemeliharaan dan perbaikan dan pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan.
- 05.02 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telpon dan Komputer
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan listrik, air, telpon dan komputer /perangkat kerja termasuk terkait perbaikan/pemeliharaan dan pemasangan.
- 06 Penggunaan Sarana dan Prasarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana termasuk kegiatan administrasi meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas, tempat parkir dan fasilitas kantor lainnya.
- 07 Ketertiban dan Keamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan.

07.00 Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan Terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas termasuk daftar nama satuan pengamanan, daftar jaga/ daftar piket, catatan gangguan/ pelanggaran/kejadian, dan surat izin keluar masuk orang atau barang.

07.01 Laporan Ketertiban dan Keamanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan ketertiban dan keamanan termasuk kehilangan, kerusakan, kecelakaan dan gangguan.

PA Pengawasan

01 Audit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan audit

01.00 Audit Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit kinerja.

01.01 Audit Operasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan audit operasional.

01.02 Audit Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan audit khusus.

01.03 Audit Unsur Tindak Pidana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan audit terkait unsur tindak pidana korupsi, money laundry, serta kasus terkait sengketa terhadap kekayaan alam, wilayah dan asset negara.

02 Reviu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan review Laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

02.00 Reviu Laporan Keuangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan reviu laporan keuangan.

02.01 Reviu Laporan Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan reviu laporan kinerja.

02.02 Reviu Rencana Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan reviu laporan anggaran.

02.03 Reviu Revisi Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan reviu revisi anggaran.

02.04 Reviu Pengelolaan Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan reviu pengelolaan anggaran.

02.05 Reviu Rencana Kegiatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan reviu rencana kegiatan.

02.06 Reviu Rengendalian Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan reviu pengendalian internal.

02.07 Reviu Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan reviu selain dari reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja, reviu rencana anggaran, reviu revisi anggaran, reviu pengelolaan anggaran, reviu rencana kegiatan, dan reviu rengendalian internal.

03 Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi.

03.00 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

03.01 Evaluasi Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi reformasi birokrasi.

03.02 Evaluasi Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi umum selain evaluasi SAKIP dan evaluasi reformasi birokrasi.

04 Pemantauan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan.

04.00 Pemantauan Rekomendasi Audit Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan rekomendasi audit internal.

04.01 Pemantauan Rekomendasi Audit Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan rekomendasi audit eksternal.

04.02 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

04.03 Pemantauan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan terkait unsur tindak pidana korupsi, money laundry, serta kasus terkait sengketa terhadap kekayaan alam, wilayah dan asset negara.

05 Pengaduan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan.

05.00 Pengaduan Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan di lingkungan internal Kemenko PMK.

05.01 Pengaduan Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan dari pihak eksternal di lingkungan Kemenko PMK.

06 Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan evaluasi.

06.00 Rencana Strategi Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana strategi pengawasan.

06.01 Rencana Kerja Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan rencana kerja tahunan.

06.02 Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional.

06.03 Laporan Hasil Audit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil audit.

06.04 Laporan Hasil Reviu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil reviu.

06.05 Laporan Pengembangan Aparat Pengendalian Intern Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengembangan aparat pengendalian intern pemerintah.

06.06 Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

06.07 Laporan Kegiatan Pengawasan Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan kegiatan pengawasan umum/tertentu.

C. Fungsi Substantif

KS Peningkatan Kesejahteraan Sosial

01 Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Naskah-naskah umum yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

02 Penanganan Kemiskinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu penanganan kemiskinan.

02.00 Sinkronisasi Data Kemiskinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sinkronisasi data kemiskinan.

02.01 Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan pedesaan yang terkait dengan isu di bidang kompensasi non pangan.

03 Jaminan Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu jaminan sosial.

03.00 Asistensi Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang asistensi sosial.

03.01 Asuransi Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang asuransi sosial.

04 Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu bantuan dan subsidi tepat sasaran.

01.00 Bantuan Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan bantuan sosial.

04.00 Subsidi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan terkait dengan subsidi.

05 Pemberdayaan Disabilitas Dan Lanjut Usia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia.

05.00 Pemberdayaan Disabilitas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas.

05.01 Pemberdayaan Lanjut Usia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan lanjut usia.

WB Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

01 Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Penanggulangan Bencana

Naskah-naskah umum yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana.

02 Pemerataan Pembangunan Wilayah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu pemerataan pembangunan wilayah.

02.00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal.

02.01 Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan berkembang.

03 Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu kawasan dan mobilitas spasial.

03.00 Pemberdayaan Kawasan Strategis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan KSBkebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis.

03.01 Pengembangan Kawasan Khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan khusus.

03.02 Bhakti PMK

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan persiapan, pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan kegiatan Bhakti PMK.

03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana.

03.04 Pengelolaan Sumber Daya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan Sumber Daya.

04 Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu mitigasi bencana dan konflik sosial.

04.00 Mitigasi Bencana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang mitigasi bencana.

04.01 Penanganan Pengungsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan pengungsi.

04.02 Bantuan Darurat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang bantuan darurat.

04.03 Pencegahan Konflik Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pencegahan konflik sosial.

04.04 Pemulihan Pasca Konflik Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemulihan pasca konflik sosial.

05 Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu kedaruratan dan manajemen pasca bencana.

05.00 Kedaruratan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu darurat bencana.

05.01 Pemulihan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemulihan pasca bencana.

05.02 Pemberdayaan Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat pasca bencana.

KK Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

01 Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan

Naskah-naskah umum yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan.

02 Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu ketahanan gizi dan promosi kesehatan.

02.00 Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

02.01 Promosi Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan promosi dan kampanye kesehatan.

03 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu pengendalian dan penanggulangan penyakit.

03.00 Pengendalian Penyakit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengendalian penyakit.

03.01 Penanggulangan KLB/Wabah dan Daruratan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang Penanggulangan KLB/Wabah dan Daruratan Kesehatan.

04 Pelayanan Kesehatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu pelayanan kesehatan.

04.00 Pelayanan Dasar dan Rujukan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pelayanan dasar dan rujukan.

04.01 Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan kesehatan dan farmasi.

05 Kependudukan Dan Keluarga Berencana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu kependudukan dan keluarga berencana.

00.00 Pembangunan Kependudukan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kependudukan.

00.01 Keluarga Berencana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang keluarga berencana.

AP Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

01 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Naskah-naskah umum yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

02 Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak.

02.00 Pemenuhan Hak Anak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, usulan rekomendasi kebijakan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak anak.

02.01 Perlindungan Anak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, usulan rekomendasi kebijakan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang perlindungan anak.

03 Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan.

03.00 Pemenuhan Hak Perempuan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, usulan rekomendasi kebijakan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak perempuan.

03.01 Perlindungan Perempuan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, usulan rekomendasi kebijakan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan.

03.02 Pemberdayaan Bidang Ekonomi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, usulan rekomendasi kebijakan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan bidang ekonomi.

03.03 Pemberdayaan Bidang Sosial dan Budaya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, usulan rekomendasi kebijakan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan bidang sosial dan budaya.

04 Pemberdayaan Pemuda

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan pemberdayaan pemuda.

04.00 Pemberdayaan Pemuda

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan pemuda.

04.01 Pengembangan Pemuda

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pemuda.

05 Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

05.00 Ketahanan Keluarga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, usulan rekomendasi kebijakan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketahanan keluarga.

05.01 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, usulan rekomendasi kebijakan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan keluarga.

RK Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

01 Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Naskah-naskah umum yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga.

02 Revolusi Mental

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu revolusi mental.

02.00 Revolusi Mental

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi gerakan revolusi mental.

02.01 Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Gerakan Revolusi Mental

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan monitoring evaluasi gerakan revolusi mental.

03 Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

03.00 Cagar Budaya dan Permuseuman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang cagar budaya dan permuseuman.

03.01 Sejarah dan Warisan Dunia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sejarah dan warisan dunia.

04 Peningkatan Prestasi Olahraga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu peningkatan prestasi olahraga.

04.00 Prestasi Olahraga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang prestasi olahraga.

04.01 Pembudayaan Olahraga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembudayaan olahraga.

05 Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu literasi, inovasi, dan kreativitas.

05.00 Nilai Budaya dan Karakter Bangsa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang nilai budaya dan karakter bangsa.

05.01 Industri Budaya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang industri budaya.

PB Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

01 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Agama

Naskah-naskah umum yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas pendidikan dan modernisasi agama.

02 Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.

02.00 PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat.

02.01 Pendidikan Dasar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dasar.

02.02 Pendidikan Menengah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan menengah.

02.03 Pendidikan Keterampilan Bekerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan keterampilan bekerja.

03 Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi.

03.00 Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi.

03.01 Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

04 Pendidikan Keagamaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu pendidikan keagamaan.

04.00 Pembinaan Umat Beragama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembinaan umat beragama.

04.01 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

05 Moderasi Beragama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu moderasi beragama.

05.00 Pemberdayaan Umat Beragama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan umat beragama.

05.01 Kerukunan Umat Beragama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kerukunan umat beragama.

06 Pendidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang Pendidikan.

07 Keagamaan dan Hari Besar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang Keagamaan dan Hari Besar.

PM Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

01 Perumusan Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

01.00 Koordinasi dan sinkronisasi tentang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan termasuk undangan rapat koordinasi dan sinkronisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan, daftar hadir rapat koordinasi dan sinkronisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan, notulensi/ laporan kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan, jadwal acara rapat koordinasi dan sinkronisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan,

materi rapat koordinasi rapat koordinasi dan sinkronisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan.

01.01 Pelaksanaan kebijakan terkait Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan manusia dan kebudayaan termasuk daftar hadir pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan manusia dan kebudayaan, notulensi/ laporan pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan manusia dan kebudayaan, dan jadwal acara pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan manusia dan kebudayaan.

01.02 Sosialisasi tentang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan termasuk undangan sosialisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan, daftar hadir sosialisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan, notulensi/ laporan sosialisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan, jadwal acara sosialisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan dan materi sosialisasi tentang pembangunan manusia dan kebudayaan.

01.03 Monitoring dan evaluasi terkait Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi terkait pembangunan manusia dan kebudayaan termasuk undangan monitoring dan evaluasi terkait pembangunan manusia dan kebudayaan, daftar hadir monitoring dan evaluasi terkait pembangunan manusia dan kebudayaan, notulensi/ laporan monitoring dan evaluasi terkait pembangunan manusia dan kebudayaan, jadwal acara monitoring dan evaluasi terkait pembangunan manusia dan kebudayaan, dan materi monitoring dan evaluasi terkait pembangunan manusia dan kebudayaan.

PP Pengkajian dan Penelaahan

01 Politik, Hukum, Keamanan, Pemerintahan, dan Hak Asasi Manusia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan politik, hukum, keamanan, Pemerintahan dan hak asasi manusia.

01.00 Koordinasi dan Sinkronisasi

Naskah-naskah terkait koordinasi dan sinkronisasi termasuk undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi/laporan kegiatan, jadwal kegiatan, dan materi rapat koordinasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan politik, hukum, keamanan, Pemerintahan dan hak asasi manusia.

01.01 Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah terkait pelaksanaan kebijakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan politik, hukum, keamanan, Pemerintahan dan hak asasi manusia termasuk daftar hadir, notulensi/laporan pelaksanaan kebijakan, jadwal acara pelaksanaan kebijakan, dan hasil kajian dan telaah kebijakan.

01.02 Sosialisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi tentang politik, hukum, keamanan, pemerintahan, dan hak asasi manusia termasuk undangan sosialisasi, daftar hadir, notulensi/laporan sosialisasi, jadwal acara sosialisasi, dan materi sosialisasi.

01.03 Monitoring dan Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi tentang politik, hukum, keamanan, pemerintahan, dan hak asasi manusia termasuk undangan kegiatan monitoring, daftar hadir,

- notulensi/laporan monitoring, jadwal acara monitoring, dan materi monitoring.
- 02 Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme, restorasi sosial dan jati diri bangsa.
- 02.00 Koordinasi dan Sinkronisasi
Naskah-naskah terkait koordinasi dan sinkronisasi termasuk undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi/laporan kegiatan, jadwal kegiatan, dan materi rapat koordinasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme, restorasi sosial, dan jati diri bangsa.
- 02.01 Pelaksanaan Kebijakan
Naskah-naskah terkait pelaksanaan kebijakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme, restorasi sosial, dan jati diri bangsa termasuk daftar hadir, notulensi/laporan pelaksanaan kebijakan, jadwal acara pelaksanaan kebijakan, dan hasil kajian dan telaah kebijakan.
- 02.02 Sosialisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi tentang multikulturalisme, restorasi sosial, dan jati diri bangsa termasuk undangan sosialisasi, daftar hadir, notulensi/laporan sosialisasi, jadwal acara sosialisasi, dan materi sosialisasi.
- 02.03 Monitoring dan Evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi tentang multikulturalisme, restorasi sosial, dan jati diri bangsa termasuk undangan kegiatan monitoring, daftar hadir, notulensi/ laporan monitoring, jadwal acara monitoring, dan materi monitoring.
- 03 Sumber Daya Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan.
- 03.00 Koordinasi dan Sinkronisasi
Naskah-naskah terkait koordinasi dan sinkronisasi termasuk undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi/laporan kegiatan, jadwal kegiatan, dan materi rapat koordinasi terhadap isu-isu yang berkaitan sumber daya ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan.
- 03.01 Pelaksanaan Kebijakan
Naskah-naskah terkait pelaksanaan kebijakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan termasuk daftar hadir, notulensi/laporan pelaksanaan kebijakan, jadwal acara pelaksanaan kebijakan, dan hasil kajian dan telaah kebijakan.
- 03.02 Sosialisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi tentang sumber daya ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan termasuk undangan sosialisasi, daftar hadir, notulensi/laporan sosialisasi, jadwal acara sosialisasi, dan materi sosialisasi.
- 03.03 Monitoring dan Evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi tentang sumber daya ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan termasuk undangan kegiatan monitoring, daftar hadir, notulensi/ laporan monitoring, jadwal acara monitoring, dan materi monitoring.
- 04 Sumber Daya Kemaritiman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya kemaritiman.

04.00 Koordinasi dan Sinkronisasi

Naskah-naskah terkait koordinasi dan sinkronisasi termasuk undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi/laporan kegiatan, jadwal kegiatan, dan materi rapat koordinasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya kemaritiman.

04.01 Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah terkait pelaksanaan kebijakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya kemaritiman termasuk daftar hadir, notulensi/laporan pelaksanaan kebijakan, jadwal acara pelaksanaan kebijakan, dan hasil kajian dan telaah kebijakan.

04.02 Sosialisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi tentang sumber daya kemaritiman termasuk undangan sosialisasi, daftar hadir, notulensi/ laporan sosialisasi, jadwal acara sosialisasi, dan materi sosialisasi.

04.03 Monitoring dan Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi tentang sumber daya kemaritiman termasuk undangan kegiatan monitoring, daftar hadir, notulensi/ laporan monitoring, jadwal acara monitoring, dan materi monitoring.

05 *Sustainable Development Goals* Pasca 2015

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan *sustainable development goals* pasca 2015 (mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan).

05.00 Koordinasi dan Sinkronisasi

Naskah-naskah terkait koordinasi dan sinkronisasi termasuk undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi/laporan kegiatan, jadwal kegiatan, dan materi rapat koordinasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan *sustainable development goals* pasca 2015.

05.01 Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah terkait pelaksanaan kebijakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan *sustainable development goals* pasca 2015 termasuk daftar hadir, notulensi/laporan pelaksanaan kebijakan, jadwal acara pelaksanaan kebijakan, dan hasil kajian dan telaah kebijakan.

05.02 Sosialisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi tentang *sustainable development goals* pasca 2015 termasuk undangan sosialisasi, daftar hadir, notulensi/ laporan sosialisasi, jadwal acara sosialisasi, dan materi sosialisasi.

05.03 Monitoring dan Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi tentang *sustainable development goals* pasca 2015 termasuk undangan kegiatan monitoring, daftar hadir, notulensi/ laporan monitoring, jadwal acara monitoring, dan materi monitoring.

06 Kependudukan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kependudukan.

06.00 Koordinasi dan Sinkronisasi

Naskah-naskah terkait koordinasi dan sinkronisasi termasuk undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi/laporan kegiatan, jadwal kegiatan, dan materi rapat koordinasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kependudukan.

06.01 Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah terkait pelaksanaan kebijakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kependudukan termasuk daftar hadir, notulensi/ laporan pelaksanaan kebijakan, jadwal acara pelaksanaan kebijakan, dan hasil kajian dan telaah kebijakan.

06.02 Sosialisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi tentang kependudukan termasuk undangan sosialisasi, daftar hadir, notulensi/ laporan sosialisasi, jadwal acara sosialisasi, dan materi sosialisasi.

06.03 Monitoring dan Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi tentang kependudukan termasuk undangan kegiatan monitoring, daftar hadir, notulensi/ laporan monitoring, jadwal acara monitoring, dan materi monitoring.

07 Pembangunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kajian dan pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan.

07.00 Koordinasi dan Sinkronisasi

Naskah-naskah terkait koordinasi dan sinkronisasi termasuk undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi/ laporan kegiatan, jadwal kegiatan, dan materi rapat koordinasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan.

07.01 Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah terkait pelaksanaan kebijakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan termasuk daftar hadir, notulensi/ laporan pelaksanaan kebijakan, jadwal acara pelaksanaan kebijakan, dan hasil kajian dan telaah kebijakan.

07.02 Sosialisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi tentang pembangunan termasuk undangan sosialisasi, daftar hadir, notulensi/ laporan sosialisasi, jadwal acara sosialisasi, dan materi sosialisasi.

07.03 Monitoring dan Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan termasuk undangan kegiatan monitoring, daftar hadir, notulensi/ laporan monitoring, jadwal acara monitoring, dan materi monitoring.

07.04 Koordinasi dan Sinkronisasi

Naskah-naskah terkait koordinasi dan sinkronisasi termasuk undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi/ laporan kegiatan, jadwal kegiatan, dan materi rapat koordinasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan transformasi birokrasi.

07.05 Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah terkait pelaksanaan kebijakan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan transformasi birokrasi termasuk daftar hadir, notulensi/ laporan pelaksanaan kebijakan, jadwal acara pelaksanaan kebijakan, dan hasil kajian dan telaah kebijakan.

07.06 Sosialisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi tentang transformasi birokrasi termasuk undangan sosialisasi, daftar hadir, notulensi/ laporan sosialisasi, jadwal acara sosialisasi, dan materi sosialisasi.

07.07 Monitoring dan Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi tentang transformasi birokrasi termasuk undangan kegiatan monitoring, daftar hadir, notulensi/ laporan monitoring, jadwal acara monitoring, dan materi monitoring.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY